

Peran Birokrasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati Tahun 2025 (Studi Kasus : Dinsos P3AKB Kabupaten Pati)

Mardiana Tri Anjarwati¹, Kushandajani²

Email: mardianaanjar12@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang , Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan data penerima manfaat, lemahnya pemutakhiran data, serta belum optimalnya koordinasi dan sistem administrasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh peran birokrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan teori birokrasi Max Weber yang meliputi aspek hierarki, aturan formal dan legalitas, impersonalitas, serta administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan indikator teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati telah mencerminkan penerapan prinsip birokrasi, namun belum berjalan secara optimal. Pada aspek hierarki, struktur organisasi dan pembagian tugas telah berjalan dengan baik, meskipun koordinasi dan pelaporan masih menghadapi kendala. Pada aspek aturan formal dan legalitas, pelaksanaan program telah mengacu pada regulasi yang berlaku, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pada aspek impersonalitas, pelaksanaan PKH telah menunjukkan penerapan prinsip objektivitas melalui penerapan kriteria penerima manfaat dan pelaksanaan tugas pendamping berdasarkan ketentuan program. Pada aspek administrasi, sistem pendataan dan pelaporan telah berjalan, tetapi belum optimal dalam pembaruan dan integrasi data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada sistem administrasi, khususnya dalam pembaruan dan integrasi data secara berkala. Selain itu, peningkatan koordinasi antar pelaksana, penguatan mekanisme pengendalian, serta optimalisasi pengawasan masyarakat melalui pertemuan rutin perlu dilakukan guna mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: birokrasi, Program Keluarga Harapan, administrasi, impersonalitas, kemiskinan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the Indonesian government's policies aimed at poverty alleviation through conditional social assistance for poor and vulnerable families. However, several challenges remain in its implementation, including inaccuracies in beneficiary data, weak data updating processes, and suboptimal coordination and administrative systems. These issues indicate that the effectiveness of the program is determined not only by the policy itself but also by the role of bureaucracy in its implementation. This study aims to analyze the role of bureaucracy in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Pati Regency. The study employs Max Weber's bureaucratic theory, which consists of hierarchy, formal rules and legality, impersonality, and administration. A qualitative method with a descriptive approach was used. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were systematically analyzed based on the indicators of the selected theoretical framework. The findings show that the implementation of PKH in Pati Regency reflects the application of bureaucratic principles, although it has not yet been fully optimal. In terms of hierarchy, the organizational structure and division of responsibilities have functioned well, despite challenges in coordination and reporting. Regarding formal rules and legality, the implementation of the program has been carried out in accordance with applicable regulations and technical guidelines. In terms of impersonality, the implementation of PKH demonstrates the application of objectivity through the use of beneficiary eligibility criteria and the performance of facilitators' duties in accordance with program regulations. In the administrative aspect, data management and reporting systems have been implemented, but data updating and integration remain less than optimal. Therefore, strengthening the administrative system, especially through regular data updating and integration, is necessary. In addition, improving coordination among implementers, strengthening control mechanisms, and optimizing community oversight through routine meetings are essential to support a more effective and well-targeted implementation of the program.

Keywords: *bureaucracy, Program Keluarga Harapan (PKH), administration, impersonality, poverty.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan kesejahteraan (Soekanto, 2002). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melaksanakan berbagai program perlindungan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu program yang menjadi instrumen utama pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan

secara berkelanjutan (Alfiyaturrohmah & Setiawan, 2023).

Keberhasilan PKH sangat dipengaruhi oleh peran birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi bertanggung jawab dalam proses pendataan, verifikasi penerima manfaat, koordinasi pelaksana program, hingga pengawasan pelaksanaan bantuan. Birokrasi yang bekerja secara rasional, profesional, dan sesuai aturan dapat meningkatkan efektivitas program, sedangkan birokrasi yang kurang optimal berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan hambatan administrasi (Bozeman, 2000).

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati pada tahun 2025 masih mencapai 105,27 ribu jiwa meskipun persentasenya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Pati, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, termasuk PKH, masih memerlukan pengelolaan yang efektif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, lemahnya pembaruan data, serta kurang optimalnya transparansi dan pelayanan program (Najidah & Lestari, 2019; Arlina et al., 2021; Majid & Zaerudin, 2023). Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada implementasi program dan belum secara khusus mengkaji peran birokrasi dalam pengelolaan PKH.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati Tahun 2025 dengan studi kasus pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber sebagai landasan untuk menganalisis peran birokrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH). Weber (1947) mendefinisikan birokrasi sebagai sistem organisasi yang rasional, impersonal, dan hierarkis yang dirancang untuk menciptakan efisiensi, keteraturan, serta kepastian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam konsep birokrasi rasional-legal, pelaksanaan administrasi publik didasarkan pada aturan formal, pembagian tugas yang jelas, hierarki kewenangan, dan profesionalisme aparatur (Weber, 1978). Melalui prinsip tersebut, birokrasi diharapkan mampu menjalankan kebijakan publik secara objektif dan konsisten sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Weber (1947), birokrasi yang ideal ditandai oleh adanya pembagian kerja yang jelas, pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan formal, serta penggunaan aturan yang mengikat seluruh anggota organisasi. Setiap pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi, sementara sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas disediakan oleh institusi, bukan oleh individu. Karakteristik tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, penerapan birokrasi dalam praktik pemerintahan tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep ideal. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah fenomena *red tape*, yaitu kondisi ketika aturan dan prosedur administratif diterapkan secara berlebihan sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik. Menurut Merton (1940, dalam Bozeman, 2000) menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan menjadi tujuan utama dan mengabaikan substansi kebijakan. Selanjutnya, Waldo (1946, dalam Bozeman, 2000) menegaskan bahwa *red tape* tidak hanya muncul pada tingkat individu, tetapi juga dapat berkembang menjadi budaya organisasi yang memengaruhi keseluruhan proses birokrasi.

Bozeman dan Feeney (2011) menjelaskan bahwa *red tape* ditandai oleh prosedur yang berlebihan, struktur hierarki yang panjang, persyaratan administratif yang tidak relevan, keterlambatan proses pelayanan, serta perilaku aparatur yang kurang responsif. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), keberadaan birokrasi yang efektif menjadi faktor penting untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan, koordinasi antar pelaksana, pembaruan data penerima manfaat, serta pengawasan program. Oleh karena itu, teori birokrasi Weber digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati menjalankan fungsi birokrasi dalam pengelolaan PKH Tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran

birokrasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati Tahun 2025. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dengan fokus kajian pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Gabus. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, yang terdiri atas Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Koordinator Kabupaten Pendamping PKH, serta beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik (Patton, 2002). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola serta tema yang berkaitan dengan peran birokrasi dalam pengelolaan PKH (Braun & Clarke, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di Kabupaten Pati, pelaksanaan PKH berada di bawah koordinasi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dengan melibatkan pendamping PKH sebagai pelaksana teknis di lapangan. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang

digunakan sebagai dasar penentuan sasaran bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PKH di Kabupaten Pati tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada proses pendampingan, pemutakhiran data, monitoring, evaluasi, serta pemberdayaan KPM. Dinas Sosial P3AKB berperan dalam koordinasi pelaksanaan program, verifikasi data, penanganan pengaduan, dan pengawasan terhadap kinerja pendamping. Sementara itu, pendamping PKH bertugas melakukan verifikasi lapangan, pendampingan keluarga penerima manfaat, serta pelaporan kegiatan kepada Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

Hierarki dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Menurut Weber, birokrasi ditandai oleh struktur hierarki yang jelas melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati telah mencerminkan prinsip hierarki melalui pembagian peran antara pemerintah pusat, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, dan pendamping PKH. Pendamping bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis di lapangan, seperti verifikasi data, pemutakhiran data KPM, dan pendampingan keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Dinas Sosial menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan persetujuan administrasi terhadap perubahan data yang diajukan oleh pendamping. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya alur pelaporan dan koordinasi yang berjalan secara berjenjang. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan hierarki

belum sepenuhnya optimal. Perubahan kondisi KPM seperti kematian, pernikahan, kelahiran, atau perubahan status ekonomi sering kali tidak segera dilaporkan kepada pendamping maupun pemerintah desa. Kondisi ini menghambat proses pemutakhiran data dan memengaruhi efektivitas koordinasi antar tingkatan birokrasi. Dengan demikian, prinsip hierarki Weber telah diterapkan secara formal, tetapi masih menghadapi kendala dalam implementasinya.

Aturan Formal dan Legalitas dalam Pelaksanaan PKH

Weber menegaskan bahwa birokrasi harus beroperasi berdasarkan aturan formal yang jelas dan mengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati telah berpedoman pada regulasi nasional, yaitu Peraturan Menteri Sosial tentang pemutakhiran data sosial ekonomi serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKH Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi dasar bagi pelaksana program dalam menjalankan kegiatan verifikasi, pendampingan, pemutakhiran data, dan penyaluran bantuan. Pendamping PKH juga melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Apabila ditemukan permasalahan yang belum diatur dalam petunjuk teknis, pendamping melakukan konsultasi kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh arahan lebih lanjut. Meskipun demikian, penelitian menemukan beberapa hambatan dalam penerapan aturan formal. Kendala utama berupa ketidaksesuaian data administrasi antara KTP dan Kartu Keluarga, keterlambatan

perekaman e-KTP, serta perubahan kondisi keluarga yang tidak dilaporkan kepada pendamping. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal belum sepenuhnya mampu menjamin kesesuaian antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan.

Prinsip Impersonalitas dalam Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Prinsip impersonalitas dalam birokrasi Weber menekankan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada kriteria objektif, bukan pada hubungan personal maupun kepentingan tertentu. Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati, prinsip ini tercermin melalui proses verifikasi lapangan yang dilakukan terhadap calon penerima bantuan. Pendamping melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah, usaha, dan keadaan sosial ekonomi calon penerima manfaat. Verifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi, serta pemeriksaan data administratif untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria program. Selain itu, pendamping secara rutin mengadakan pertemuan dengan KPM sebagai media penyampaian informasi, evaluasi, dan pengawasan program. Pertemuan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PKH. Meskipun mekanisme verifikasi telah dilakukan secara objektif, penelitian menemukan bahwa interaksi yang intens antara pendamping dan masyarakat berpotensi memunculkan kedekatan personal yang dapat memengaruhi objektivitas apabila tidak dikelola secara profesional. Oleh

karena itu, prinsip impersonalitas telah diterapkan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa pengaruh faktor sosial dalam pelaksanaannya.

Administrasi dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Administrasi merupakan salah satu karakteristik utama birokrasi Weber yang menekankan pentingnya pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi PKH di Kabupaten Pati telah berjalan melalui sistem pendataan dan pemutakhiran data KPM menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Pendamping PKH diwajibkan menyusun laporan harian dan laporan bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Laporan harian dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa foto bergeotag, sedangkan laporan bulanan merupakan rekapitulasi dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan selama satu bulan. Selain itu, koordinasi antarpending juga dilakukan secara rutin sebagai sarana evaluasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul di lapangan. Namun demikian, sistem administrasi masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan utama berkaitan dengan ketidaksesuaian data kependudukan, perubahan kondisi sosial ekonomi KPM yang tidak segera diperbarui, serta keterlambatan pelaporan perubahan data. Kondisi tersebut berdampak pada akurasi data penerima manfaat dan efektivitas pelaksanaan program.

Analisis Peran Birokrasi dalam Pelaksanaan PKH

Berdasarkan analisis menggunakan teori birokrasi Max Weber, pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati telah menunjukkan penerapan empat prinsip utama birokrasi, yaitu hierarki, aturan formal, impersonalitas, dan administrasi. Struktur organisasi dan pembagian tugas telah terbentuk secara jelas, pelaksanaan program didasarkan pada regulasi yang berlaku, penentuan penerima manfaat dilakukan melalui proses verifikasi objektif, serta administrasi program telah memanfaatkan sistem pelaporan dan pendataan yang terstruktur. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa keempat aspek tersebut belum berjalan secara optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data administrasi, keterlambatan pemutakhiran data, perubahan kondisi KPM yang tidak dilaporkan, serta masih adanya faktor sosial yang berpotensi memengaruhi objektivitas pelaksanaan program. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan birokrasi dalam mengelola program. Hasil penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada efektivitas dan implementasi PKH. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ketepatan sasaran, transparansi, dan efektivitas program tidak dapat dilepaskan dari kualitas struktur birokrasi yang mendasarinya. Dengan demikian, penguatan koordinasi, pembaruan data secara berkala, serta peningkatan kualitas administrasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati telah menerapkan prinsip-prinsip birokrasi Max Weber yang meliputi hierarki, aturan formal, impersonalitas, dan administrasi. Struktur pelaksanaan program telah memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dan pendamping PKH, sehingga mendukung proses koordinasi dan pengawasan program.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip birokrasi tersebut belum berjalan secara optimal. Pada aspek hierarki, koordinasi dan pelaporan masih menghadapi kendala akibat perubahan data KPM yang tidak selalu dilaporkan secara tepat waktu. Pada aspek aturan formal, pelaksanaan program telah mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku, namun masih ditemukan ketidaksesuaian data administratif. Pada aspek impersonalitas, penetapan KPM telah dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang objektif, tetapi masih terdapat potensi pengaruh faktor sosial dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pada aspek administrasi, sistem pendataan dan pelaporan telah berjalan secara terstruktur melalui pemanfaatan SIKS-NG dan laporan berjenjang, namun masih menghadapi permasalahan integrasi dan akurasi data.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati tidak hanya ditentukan oleh kebijakan program, tetapi juga oleh kualitas birokrasi dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, verifikasi, dan pengelolaan data. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi,

pemutakhiran data secara berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi antar pelaksana

menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyaturrohmah, A., & Setiawan, Z. (2023).

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2021. *Spektrum*, 20(2), 35-49.

Anggun Nurul Chasanah, dan Almisar hamid. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2025), 53-67.

Arlina, Guntur, Muhammad, Nain, dan Umar. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialekta Kontemporer*, 9.2 (2021), 70-80.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2025, Januari 6). Profil kemiskinan Kabupaten Pati 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. Diakses pada 5 Oktober 2025, dari

<https://patikab.bps.go.id/id/news/2025/01/06/977/profil-kemiskinan-kabupaten-pati-2025.html>

Bozeman, B. (2000). *Bureaucracy and red tape*. Prentice Hall.

Darma, I. G. K. I. P. (2020). Peranan Batik Bakaran Sebagai Cenderamata Khas Kecamatan Juwana. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 8(1), 49-62.

Desvara, Z., & Maesaroh, M. (2025). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PASAR JOHAR KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-12.

Edward III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional

Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kadir, A. (2015). *Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah*

- Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1(1), 40-54.
- Kafera, N. C. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanjung Qencono (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Majid, A dan Z Zaerudin. Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Promotif Preventif*, 6.1 (2023), 164-75.
- Moleong, L. J. (2011). Metode penelitian kualitatif.
- Mulyadi, M. (2017). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221-236.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.
- Nabila, N. (2023). Kepemimpinan Kepala Daerah Independen Kota Metro Provinsi Lampung Dalam Stabilitas Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021-2022 (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Putra, A. I. P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 226-236.
- Ramziah, dan Mahrizal. Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten

- Pidie. Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 9.1 (2021), 45-50.
- Rukmana, B. I., & Citra, F. P. (2022). Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial. Nusantara Journal of Economics, 4(01).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8(03).
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). Manajemen Publik: Teori dan Praktik. Universitas Brawijaya Press.
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2020). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 9(2), 147-163.
- Zaeni, A. (2006). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).